



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 10/10/2024
 Accepted : 15/10/2024
 Published : 25/10/2024

Linton Naibaho¹
 Johana Andriani
 Nainggolan²
 Nelly Moria Hutapea⁴
 Sthepany Lumban
 Tobing⁵
 Desy Yolanda Br
 Bangun⁶
 Fazli Rachman⁷

**PERAN
 KEWARGANEGARAAN
 MENANGGULANGI DISINFORMASI DAN
 HOAKS DI ERA MEDIA SOSIAL PADA
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 PERSPEKTIF SISWA/I SMA SWASTA
 ERIA MEDAN**

Abstrak

Di tengah pesatnya arus informasi digital, pemilih, terutama generasi muda, rentan terhadap penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi proses demokrasi. Pendidikan warga negara memiliki potensi strategi dalam membekali siswa dengan kemampuan literasi media, berpikir kritis, dan pemahaman tentang etika digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks di era media sosial pada kampanye pemilihan umum tahun 2024, dengan perspektif siswa/i SMA SW Eria. Disinformasi dan hoaks menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi, terutama selama periode kampanye pemilihan umum, di mana informasi palsu dapat mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih muda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner yang diisi oleh siswa/i SMA SW Eria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, dan etika bermedia. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya disinformasi dan hoaks, serta mendorong mereka untuk menjadi pemilih yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan fokus pada literasi media dan kritis untuk menangkal disinformasi dan hoaks di kalangan generasi muda.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kampanye , Media Sosial, Peran Pkn, Dis-Informasi, Hoaks

Abstract

In the midst of the rapid flow of digital information, voters, especially the younger generation, are vulnerable to the spread of fake news that can affect the democratic process. Citizen education has strategic potential in equipping students with media literacy skills, critical thinking, and an understanding of digital ethics. This research aims to analyze the role of citizenship education in overcoming disinformation and hoaxes in the era of social media in the 2024 general election campaign, from the perspective of SW Eria High School students. Disinformation and hoaxes pose serious challenges to the democratic process, especially during election campaign periods, where false information can influence the perceptions and choices of young voters. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and questionnaires filled out by SW Eria High School students. The research results show that citizenship education has an

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email: lintonrajaoloan@gmail.com¹, johanaandrianinainggolan@gmail.com², nellymoria0@gmail.com³,
 tobingsthepany@gmail.com⁵, yolandbangun08@gmail.com⁶, fazli.rachman@unimed.ac.id⁷

important role in equipping students with digital literacy skills, critical thinking and media ethics. Effective civics education can increase students' awareness of the dangers of disinformation and hoaxes, and encourage them to become smarter and more responsible voters. This research recommends improving the citizenship education curriculum with a focus on media and critical literacy to counter disinformation and hoaxes among the younger generation.

Keywords: General Elections, Campaigns, Social Media, Role Of Pkn, Dis-Information, Hoaxes

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum di dalam konstitusi (Pembukaan UUD 1945), hal tersebut Membangun kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan Memberikan anggaran tertinggi dibandingkan sektor lain yang diatur dalam UUD. Dalam misi tersebut Negara menghadirkan Ilmu *Civic Education* sebagai sarana mendidik generasi bangsa untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon- calon penerus bangsa. Implementasi pendidikan yang kurang optimal berdampak pada kualitas sumber daya manusia peserta didik karena kurang optimal sehingga memudahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sehingga berujung pada tindak pidana. Di sisi lain, era digital memiliki dampak negatif selain berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, jumlah pengguna internet khususnya media sosial dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun kejahatan di dunia maya juga semakin meningkat.

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi memberikan dampak bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan menggunakan media internet. Di dalam media maya yang menggunakan internet tidak mengenal adanya batas baik yang berupa batas wilayah maupun batas antar negara. Kemajuan teknologi informasi tersebut sudah tentu selalu mengikuti perkembangan zaman dengan munculnya berbagai macam media termasuk media online. Di samping itu setiap orang juga dengan mudahnya dapat membuat dan menyebarkan informasi yang berisikan berita dan pesan melalui berbagai macam media sosial yang terus berkembang saat ini melalui *Website, Blog seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp* dan media sosial lainnya. Hal tersebut mengakibatkan informasi tersebut seringkali diterima oleh masyarakat tanpa adanya filter sehingga para pembacanya tidak melakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap content yang berisi informasi yang telah diterimanya tersebut.

Pada kontestasi pemilu penyebaran disinformasi dan hoaks rentan terjadi . Salah satu dampak tersebut adalah maraknya penyebaran hoax atau berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil Pemilu. Pendidikan politik yang belum masif membuat minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada, sudah saatnya masyarakat dibekali dengan Pendidikan Politik, khususnya bagi pelajar. Tujuannya memberikan dan menganalkan pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik. Fenomena penyebaran hoax dalam Pemilu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendidikan politik di Indonesia. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami arti pentingnya menjaga integritas dalam Pemilu. Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang Pemilu dan mudah terpengaruh oleh berita palsu yang tersebar di media sosial. Dalam *study kasus* Pemilu tahun 2024 penyelenggaraanya kampanye kerap menghadirkan wajah ganda. Satu wajah memesonakan, penuh harapan dan menunjukkan gairah demokrasi elektoral yang sejatinya penting dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Wajah lainnya, menunjukkan sisi gelap pertarungan penuh hiruk-pikuk opini dan histeria massa yang kerap tidak mengindahkan etika, hukum dan keadaban berpolitik. Beragam cara persuasi dalam proses pemasaran politik pun

membanjiri ruang publik hingga ke ruang pribadi dan keluarga. Dibutuhkan kecerdasan komunikasi baik dalam memproduksi, mendistribusikan maupun mengkonsumsi informasi selama masa kampanye pemilu 2024 yang berlangsung mulai dari tanggal 28 November hingga 10 Februari 2023. Sehingga, kita bisa memahami, memaknai dan mengkritisi wajah kampanye ini dalam kewarasan dan keajegan nalar publik. Sementara kampanye hitam menyerang pihak lain dengan gosip atau rumor yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Sumber penyebar pesan kampanye tidak jelas, samar bahkan seringkali secara sengaja bergerak dalam operasi gelap dan tak tersentuh proses dialektika. Beberapa teknik kampanye hitam yang sering dipakai dalam perang opini di masyarakat, lazimnya menggunakan teknik-teknik propaganda. Pertama, teknik name calling artinya pemberian label buruk pada lawan. Misalnya melabeli ketiga kandidat dengan sebutan dan stigma sangat buruk.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks, meneliti penyebab dan dampak penyebaran hoax pada Pemilu, serta memberikan rekomendasi mengenai strategi pendidikan kewarganegaraan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoax pada Pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis dalam upaya meminimalkan dampak negatif dari penyebaran hoax pada Pemilu dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pemilu melalui pendidikan kewarganegaraan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap berbagai literatur dan studi kasus penyebaran *hoax* pada Pemilu.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan data kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman dan pandangan individu dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini sering menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks, serta memahami perspektif siswa/i. Penelitian dilakukan di lingkungan sekolah untuk mendapatkan pandangan langsung dari siswa/i. Populasi diambil Siswa/i SMA SW Eria Medan yang sedang mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Menggunakan teknik *purposive sampling*, memilih siswa/i dari berbagai kelas dan latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Melakukan wawancara dengan siswa/i untuk menggali pemahaman mereka tentang disinformasi, hoaks, dan peran pendidikan kewarganegaraan. Menganalisis materi ajar pendidikan kewarganegaraan yang digunakan di sekolah dan konten media sosial terkait hoaks. Mengidentifikasi tema-tema kunci dari data wawancara dan FGD yang berkaitan dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi disinformasi. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam mengatasi disinformasi dan hoaks di kalangan siswa/i, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa, artinya pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan *smart citizen* (warga negara yang cerdas) guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Pendidikan kewarganegaraan ialah bentuk penggemblengan individu - individu agar mendukung dan memperkuat politik dinegaranya, sepanjang politik itu hasil dari kesepakatan. Tidak mungkin Pendidikan kewarganegaraan itu menentang atau berlawanan dengan politik yang ada di negara tersebut. Justru sebaliknya,

Pendidikan kewarganegaraan mendukung dan memperkuat politiknya. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah agar warganya menjadi warga negara yang baik, karena warga yang baik secara tidak langsung mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan. Proses dari pendidikan Kewarganegaraan itu untuk memberdayakan. Pendidikan Kewarganegaraan, sering disingkat PKn, merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang aturan dan hukum yang berlaku, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara dalam hubungannya dengan negara, bangsa, dan masyarakat. Singkatnya, pendidikan ini mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana cara kita berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkualitas, berkarakter, dan aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, individu diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan utamanya adalah rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, PKn juga bertujuan untuk; Menanamkan rasa bangga terhadap negara dan budaya bangsa. Membangun karakter yang kuat, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menjalankannya. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Menanamkan nilai-nilai demokrasi dan melatih siswa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di era globalisasi seperti sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan semakin relevan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan sosial dan emosional yang tinggi. PKn berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dan menjadi warga negara yang produktif.

Secara keseluruhan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dan akhlak setiap warga negara dalam Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen pada persatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar dan sistematis, sesuai dengan perkembangan dan psikologi serta latar belakang kehidupannya, mendorong siswa untuk mempelajari seluruh kehidupan demokrasi, yaitu belajar demokrasi, belajar dalam iklim, dan menegakkan demokrasi melalui pembelajaran dan Menurut kurikulum Center yang dikutip oleh Sunarso, dkk (2008: 11).

Dampak Disinformasi Dan Hoaks Pada Kampanye Pemilihan Umum

Disinformasi dan hoaks memiliki dampak yang signifikan pada kampanye pemilihan umum. Informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja dapat mempengaruhi persepsi pemilih, mengarahkan opini publik secara salah, serta menurunkan kualitas debat politik. Hal ini seringkali dimanfaatkan untuk menjatuhkan reputasi kandidat tertentu atau mempolarisasi masyarakat melalui isu-isu sensitif. Akibatnya, pemilih mungkin membuat keputusan berdasarkan kebohongan atau misinformasi, yang mengancam integritas pemilu dan demokrasi. Selain itu, hoaks dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi dan media, memperburuk polarisasi politik di masyarakat.

Beberapa karakteristik konten hoaks yaitu berita bohong disebarluaskan melalui media sosial akan berdampak lebih besar; pesan yang dikirim negatif akan berdampak kecemasan dan panik; terdapatnya himbauan kepada pembaca untuk meneruskan berita tersebut kepada kelompok pengguna yang lebih luas, sehingga menyebabkan berita bohong akan beredar luas secara cepat. Penulis mengelompokkan kasus hoaks berdasarkan subjek yang dituju, yaitu Penyelenggara Pemilu, Calon Peserta Pemilu, dan Pemerintah. Keadaan diperburuk ketika stakeholder terkait belum secara massif dan simultan menanganinya, dapat dipastikan berita tersebut akan menurunkan kepercayaan dan integritas penyelenggara Pemilu di mata masyarakat. Hoaks yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu memiliki tujuan untuk membentuk opini masyarakat, sekaligus untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Menurut Rahadi, D. R. (2017) penyebar hoaks tidak selalu faktor kesengajaan tapi juga terjadi karena pengguna internet tidak melakukan pengecekan berita, sehingga kelompok pengguna memiliki pikiran massif.

Motif politik merupakan alasan utama penyebaran hoaks yang ditujukan kepada peserta Pemilu. Tujuan untuk menjatuhkan pihak lawan politik, pemerintah atau incumbent, dengan merusak citra lawan dan menyebarkan berita sarat akan SARA. Motif lain adalah motif ekonomi yang mengkalkulasikan keuntungan pihak pembuat hoaks dengan memperoleh keuntungan dari rating kunjungan. Selain itu juga terdapat motif ideologi karena adanya perbedaan kepercayaan dan ideologi sehingga menyebarkan hoaks terhadap lawan politik, berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat yang memiliki ideologi dan kepercayaan yang sama dengan pengirim pesan. Sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Juditha (2018) yang menyatakan bahwa tujuan penyebaran hoaks dapat berupa motif ekonomi, ideologi dan politik.

Beberapa kelemahan penanganan hoaks dalam Pemilu oleh Penyelenggara dan Pemerintah adalah Pertama, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih banyak dilakukan melalui tatap muka, media cetak ataupun website. Terdapat pemilih yang belum terjangkau sosialisasi, adanya kecenderungan Pemilih yang datang pada kegiatan sosialisasi Pemilu tatap muka adalah orang-orang yang sudah sering ikut sosialisasi. Sementara berita yang diakses di medsos dan website tidak menarik seluruh peminat Pemilih, karena berita yang disampaikan berupa Laporan Kegiatan dan prosedural, belum membahas isu-isu terkini. Hoaks yang diungkapkan secara massif belum ditanggapi secara serius oleh KPU.

Kedua, KPU belum memiliki tim khusus anti hoaks, sehingga berita negatif kepada Penyelenggara KPU tidak dapat langsung diatasi dan dibiarkan begitu saja, sehingga berita hoaks terus menerus dibicarakan dan digiring ke arah opini negatif sesuai pikiran umum dan dianggap benar oleh mayoritas netizen dalam kelompok tersebut. Ketiga, penyelenggara dan pemerintah belum memiliki aplikasi anti hoaks otomatis, sehingga secara simultan belum dapat menghambat perkembangan berita bohong.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggulangi Disinformasi dan Hoaks

Kata hoax jika ditelusuri dari sejarah asal katanya pertamakali populer digunakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-18. Berasal dari kata yang kerap digunakan oleh para pesulap yakni "hocus pocus". Istilah *hocus pocus* sendiri pertamakali muncul awal Abad ke-17. Kata tersebut, diambil dari nama pesulap yang kerap menyebut sendiri namanya dengan julukan 'The King Majesties most excellent Hocus Pocus' karena dalam setiap penampilannya menggunakan beragam trik sulap, dia selalu melafalkan ucapan atau mantra "hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo". Pesulap yang terkenal berikutnya menggunakan frase "Hax pax max deus adimax". Jenis-jenis hoax yang paling sering muncul pada Pemilu dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di masing-masing negara. Namun, beberapa jenis hoax yang umumnya muncul pada Pemilu antara lain: Hoax tentang calon atau partai politik: Informasi palsu atau tidak benar tentang calon atau partai politik dapat disebarluaskan oleh pihak-pihak yang ingin mempengaruhi opini publik atau memperoleh keuntungan politik. Hoax tentang hasil pemilu: Informasi palsu tentang hasil pemilu dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di masyarakat, serta dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan membuat orang-

orang tertentu tidak datang ke TPS. Dalam jangka panjang, dampak dari penyebaran hoax pada Pemilu dapat merusak demokrasi secara keseluruhan. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang akurat dan benar dapat kehilangan kepercayaan pada proses politik dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam demokrasi (Heryanto, 2018). Akibatnya, partisipasi politik dan partisipasi dalam proses demokrasi dapat menurun, yang dapat mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Penyebaran hoax pada Pemilu dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan demokrasi secara umum. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain: Menurunkan kualitas informasi politik: Penyebaran hoax dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat dan tidak berdasar. Hal ini dapat menurunkan kualitas informasi politik yang diterima oleh masyarakat dan mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh mereka. Memperkuat polarisasi: Penyebaran hoax dapat memperkuat polarisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan konflik politik yang semakin memperdalam perpecahan masyarakat. Memicu ketidakpercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi: Penyebaran hoax dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi. Mereka mungkin merasa bahwa pemilu tidak adil atau transparan, dan bahwa pihak yang berwenang tidak dapat dipercaya. Meningkatkan risiko kekerasan politik: Penyebaran hoax dapat memicu konflik dan kekerasan politik. Masyarakat yang terprovokasi oleh informasi yang tidak benar dapat melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk protes atau balas dendam. Dan meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh asing: Penyebaran hoax juga dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap pengaruh asing yang mencoba mempengaruhi hasil pemilu atau kebijakan politik.

Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi. Oleh sebab itu, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder perlu menyusun strategi untuk menangani hoaks yang sangat cepat berkembang terutama di internet dan media sosial.

Beberapa teori dan penelitian terdahulu mendefinisikan hoaks sebagai berita palsu atau informasi belum pasti kebenarannya, yang dapat membentuk opini publik. Penelitian ini dikemukakan oleh Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017), Situngkir, H. (2017), Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017), Siswoko, K. H. (2017), Walsh, L. (2006) dan Juditha, C. (2018). Penelitian tersebut sepakat bahwa penyebaran hoaks tertinggi terjadi di media sosial karena informasi disampaikan oleh pengguna secara langsung tanpa penyaringan, penilaian dan pemeriksaan fakta, termasuk penyebaran berita palsu dalam Pemilu. Perkembangan hoaks semakin terbuka lebar dan tak terkendali seiring dengan kebebasan media dan berpendapat untuk menciptakan Pemilu yang demokratis.

Pada era demokratisasi masyarakat bebas menyampaikan pendapat, mendukung dan mengkritik peserta Pemilu, salah satunya melalui media sosial. Media ini juga digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk memberikan literasi dan sosialisasi, sementara peserta Pemilu menggunakan media sosial untuk menyampaikan program dan gagasan serta membangun citra diri. Hal ini menyebabkan media sosial memegang peran strategis untuk mentransfer informasi, penyampaian aspirasi, dan pendidikan pemilih. Mudah dan mudahnya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi menyebabkan terus meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia.

Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang Pemilu dan mudah terpengaruh oleh berita palsu yang tersebar di media sosial. Dikatakan oleh Septanto (2018) bahwa hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk cyber crime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan, tetapi berdampak sangat besar bagi

kehidupan sosial masyarakat. Kedua pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa hoax dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter dalam bentuk cyber crime. Sejalan dengan era post truth ini, Syuhada (2018) menyampaikan sebuah isu menyangkut media bahwa dunia sekarang pada masa yang mengkhawatirkan dengan sirkulasi peredaran berita yang dipelintir dan informasi palsu yang beredar melalui media sosial terutama dalam sorotan ini adalah facebook dimana perusahaan ini mendapatkan untung besar karena persebaran berita negatif yang ada di lini masa facebook. Meskipun demikian hampir semua media sosial mengalami hal yang sama bahwa berita bohong atau hoax semakin menyebar dalam lingkungan media sosial.

Dalam era digital yang semakin kompleks, disinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat memicu perpecahan, polarisasi, dan bahkan kekerasan. Di sinilah peran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat krusial. Sebelum membahas peran PKn, penting untuk memahami apa itu disinformasi dan hoaks. Disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat salah untuk menyesatkan orang lain, sedangkan hoaks adalah informasi palsu yang disebarluaskan secara cepat dan luas. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi disinformasi dan hoaks. Beberapa peran penting PKn yaitu menumbuhkan Kritis: PKn mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mengevaluasi informasi yang mereka terima, membedakan fakta dan opini, serta mendeteksi informasi yang tidak kredibel, memupuk Literasi Digital: PKn dapat menjadi wadah untuk membekali siswa dengan literasi digital. Siswa diajarkan untuk mencari sumber informasi yang kredibel, mengecek fakta, dan menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar, menanamkan Nilai-nilai Demokrasi: PKn mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi kebenaran. Nilai-nilai ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang memecah belah, meningkatkan Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab: PKn mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks, dan membangun Kepercayaan terhadap Institusi: PKn mengajarkan siswa tentang pentingnya lembaga-lembaga negara dan peran mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memahami peran lembaga-lembaga ini, siswa akan lebih mudah membedakan informasi yang benar dan yang tidak.

Untuk mengoptimalkan peran PKn dalam menanggulangi disinformasi, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperkuat Kurikulum PKn: Kurikulum PKn perlu diperkaya dengan materi-materi yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan Metode Pembelajaran yang Aktif: Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, simulasi, dan proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa, memberikan Contoh Kasus Nyata: Guru dapat memberikan contoh kasus nyata tentang disinformasi dan hoaks yang terjadi di Masyarakat, memanfaatkan Teknologi, Dimana Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa belajar tentang literasi digital, kolaborasi dengan Pihak Lain: Sekolah dapat bekerja sama dengan media, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya disinformasi.

Menjaga Keajegan Nalar saat Kampanye

Secara prosedural, mekanisme sirkulasi elite lewat pemilu yang dilakukan secara reguler termasuk Pemilu 2024, memang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, kepastian, dan keterjagaan sistem pemerintahan. Namun regularitas waktu penyelenggaraan saja tak cukup, butuh pendekatan yang lebih substantif yakni praktik demokrasi deliberatif. Kata deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses mampu menghadirkan konsultasi publik, atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif berupaya meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini. Komunikasi mengembangkan niat baik, pemahaman bersama yang harus dikelola secara berkelanjutan. Faktanya, realitas demokrasi selalu berisik dan menghadirkan perbedaan sebagai keniscayaan. Komunikasi membuka ruang

untuk bersepakat (*zone of possible agreement*) yang memungkinkan setiap kepentingan dan perbedaan bisa bertemu, berdialog, berdialektika bahkan menjadi konsensus bersama. Syaratnya, tatakelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas bersama.

Analisis Kendala dan Kelemahan Penanganan Hoaks dalam Pemilu oleh Pemerintah

Kendala dan kelemahan pengendalian yang dilakukan Pemerintah antara lain: terdapat kekosongan dalam aturan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, hanya mengungkapkan antisipasi penanganan hoaks, namun tidak menghilangkan akar permasalahan penyebab hoaks tersebar. Selain itu Pemerintah belum mampu melaksanakan koordinasi antar instansi secara efektif dan belum memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar beretika menggunakan sosial media. Aturan hukum yang menjerat penyebar hoaks pun masih lemah, karena terkendala pada alat bukti elektronik. Selain itu, perlu meningkatkan literasi melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan yang aktif. Sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rengganis (2019) menyatakan bahwa program Pendidikan pemilih dan sosialisasi penyandang disabilitas masih sebatas tatap muka belum ada sosialisasi yang efektif, sehingga membuka peluang tingginya penyerapan berita hoaks padakelompok disabilitas. Strategi yang ditawarkan penulis dalam pengendalian hoaks melalui kelembagaan adalah sebagai berikut: Pertama, aturan terkait pelanggaran Hoaks harus dibenahi, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 harus diubah, yakni terdapat frasa pada Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa harus ada unsur mengakibatkan kerugian, sehingga pelaku hoaks tidak dapat dituntut jika kerugian tidak terjadi. Kedua, Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif membuat aturan hukuman dan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pembuat dan penyebar berita hoaks.

SIMPULAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, di mana media sosial memainkan peran dominan dalam penyebaran informasi, tantangan besar dalam menjaga integritas informasi dan mengatasi disinformasi serta hoaks semakin nyata. Studi ini telah menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam menanggulangi fenomena ini, khususnya dalam konteks kampanye pemilihan umum tahun 2024. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga membekali individu dengan keterampilan kritis yang diperlukan untuk menganalisis dan menilai informasi secara lebih efektif. Melalui pendekatan yang berbasis pada pengembangan pemikiran kritis, literasi media, dan etika komunikasi, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap disinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial.

Studi kasus pada kampanye pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan inisiatif masyarakat dapat memperkuat ketahanan informasi publik. Dengan meningkatkan kesadaran tentang cara kerja algoritma media sosial dan dampaknya terhadap persepsi publik, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dalam berbagi informasi, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi penyebaran informasi palsu.

Namun, tantangan tetap ada, dan keberhasilan implementasi pendidikan kewarganegaraan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat luas. Melalui upaya kolektif, diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika media sosial, serta menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan dan lebih siap menghadapi tantangan informasi di masa depan. Dengan demikian, untuk menghadapi tantangan informasi di era media sosial yang semakin kompleks, pendidikan kewarganegaraan harus terus diperkaya dan diperkuat, sehingga dapat berfungsi sebagai benteng terhadap disinformasi dan hoaks, serta mendukung terciptanya pemilu yang lebih adil dan transparan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah Yudi dkk. 2020. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MORAL PESERTA DIDIK DALAM MENANGGAPI BERITA HOAX. Prihma Sinta Utami. Ponorogo
- Putra Febriansyah dkk. 2023. Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*
- Emillia. 2022. Pengaruh Perspektif Hukum HOAX Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Civics and Education Studies*
- Gultom Dhea Rivani dkk. 2023. Upaya Pancasila Dalam Pencegahan Hoax Di Sosial Media Terhadap Mahasiswa. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat. Sumatera Utara*
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoaks di media sosial. *Jurnal Manajemendan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Delmana, L. P. (2023). STRATEGI PENANGANAN HOAKS PEMILU MELALUI PENERAPAN SMART CONTRACT LOGIC SERTA SISTEM DETEKSI HOAKS OTOMATIS. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 196-199